

GOOD PUBLIC GOVERNANCE DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

M. Khoiru Rusydi

Universitas Brawijaya¹

Hilda Rossieta

Universitas Indonesia

Abstract: *Good public governance should be able to improve the human development index, this research aims to empirically examine the effect of good governance to Human development Index (HDI) in Indonesia.*

This research is a quantitative model with multiple regression analysis method, regression method is applied in 33 provinces in Indonesia in 2008 and 2012. Selection in 2008 and 2012 because the research data of 2008 and 2012 is the available data are issued by the Partnership on the index CG

The results of this research that good governance has a positive effect on Human Development Index (HDI) in Indonesia, which means that the principles of good governance contained will have an impact on the effectiveness and efficiency of government performance, so the impact good governance also leads to a Human Development Index (HDI). These results also prove that the accountability and corruption perception index also can strengthen good governance influences affect Human Development Index (HDI) in Indonesia.

Keywords: *Human Development Index, Good Governance, Corruption Perception Index, Accountability.*

1. Pendahuluan

Penelitian ini termotivasi oleh pernyataan Kofi Annan selaku Sekjen PBB dalam Laporan Tahunan PBB, yang menyebutkan "*Good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development.*" (Resnick, 2005). Pidato Kofi Annan tersebut menunjukkan adanya tingkat tata kelola yang baik (*good governance*) pada suatu negara, akan di ikuti berkurangnya angka kemiskinan dan juga naiknya indeks pembangunan manusia. Penelitian ini juga di motivasi masih sedikitnya penelitian di Indonesia yang menghubungkan antara *good public governance* dan indeks pembangunan manusia, sebagian besar penelitian di Indonesia masih menguji pengaruh belanja daerah,

¹ Mahasiswa PIA-UI (m_khoiru_r@yahoo.com)

rasio gini, desentralisasi fiskal ataupun otonomi daerah terhadap tingkat indeks pembangunan manusia. (Setiawan & Hakim. 2013; Widodo et.al.2011; Badrudin.2011).

Beberapa penelitian diantaranya, Faguet (2004) menemukan pola investasi dalam modal manusia dan pelayanan sosial berubah secara signifikan setelah desentralisasi. Sedangkan Umbreen (2010) menemukan lemahnya akuntabilitas pada *public governance* berdampak pada korupsi. Zaman, K. (2012) menemukan bahwa indikator keuangan bertindak sebagai pendorong penting bagi peningkatan sumber daya manusia di Pakistan. Godwin (2012) juga menemukan bahwa aspek penegakan aturan hukum yang kuat, regulasi yang kuat dan stabilitas politik berhubungan positif dengan peningkatan pembangunan (termasuk indeks pembangunan manusia). Widodo (2011) menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan diikuti oleh tidak hanya peningkatan IPM tetapi juga oleh penurunan persentase penduduk adalah miskin. Selain itu penelitian Sebudubudu (2010) menemukan bahwa *good governance* di Botswana memfasilitasi pembangunan dan berdampak positif terhadap kemiskinan dan stabilitas.

Penelitian terhadap IPM di beberapa negara menemukan bahwa korupsi juga dapat menghambat pembangunan manusia, dan perkembangan ekonomi serta sosial budaya. Tata kelola pemerintah yang baik dan demokrasi berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat korupsi (Nielsen and Haugaard, 2000). Hasil pengujian (Akçay, 2006) menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan secara statistik antara indeks korupsi dan indeks pembangunan manusia. Bukti empiris dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa negara-negara yang lebih korup cenderung memiliki tingkat yang lebih rendah pada indeks pembangunan manusia. Sementara Outreville (1999) menemukan hubungan positif antara kinerja keuangan suatu negara dengan tingkat indeks pembangunan manusianya pada 57 negara berkembang.

Penelitian ini bertujuan, pertama menguji pengaruh *good public governance* terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kedua, penelitian ini akan menguji penguatan akuntabilitas dan transparansi pada pengaruh *good public governance* terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penguatan indeks persepsi korupsi pada pengaruh *good public governance* terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks *good governance* dalam penelitian ini merujuk pada indeks yang di publikasikan lembaga Kemitraan, sedangkan akuntabilitas dan transparansi mengacu pada opini laporan keuangan pemerintah daerah yang di keluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - RI, sedangkan indeks persepsi korupsi daerah di Indonesia yang di keluarkan oleh lembaga transparansi Indonesia. Untuk indikator IPM merujuk pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) - RI.

Penelitian ini membuktikan bahwa *good governance* berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia, yang artinya bahwa prinsip-prinsip yang terkandung *good governance* akan membawa dampak pada efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintahan, sehingga dampak *good governance* juga akan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil ini juga membuktikan bahwa akuntabilitas dan juga indeks persepsi korupsi dapat memperkuat pengaruh *good governance* terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.

2. Kajian Literatur Dan Pengembangan Hipotesis

2.1. Good Governance

Good governance merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat dan juga praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan dalam penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif di semua tingkatan. (web.worldbank.org/diakses; 21-5-2014). Terdapat 10 prinsip *good governance* yang disampaikan oleh Komite Nasional

Kebijakan Governance (KNKG) yaitu; (i) *akuntabilitas*, (ii) *pengawasan*, (iii) *daya tanggap*, (iv) *profesionalisme*, (v) *efisiensi & efektivitas*, (vi) *transparansi*, (vii) *kesetaraan*, (ix) *partisipasi*. dan (x) *penegakan hukum*. (<http://knkg-indonesia.com>; diakses 21-5-2014).

2.2. Indeks Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia adalah manusia sebagai proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak (bps.go.id; diakses 21-5-2014). Salah satu pengukuran pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. (bps.go.id; diakses 21-5-2014).

2.3. Pengambangan Hipotesis

2.3.1. Pengaruh *Good Governance* Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Prinsip-prinsip yang terkandung *good governance* akan membawa dampak pada efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintahan, sehingga dampak *good governance* juga akan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian oleh Sebudubudu (2010) menyatakan adanya hubungan positif antara *good governance* dengan *Human Development Index di Botswana*, demikian pula dengan hasil penelitian Resnick (2005) yang membuktikan bahwa *good governance* salah satu hal terpenting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan IPM.

Penelitian dari Ottervik (2011) juga memberikan bukti adanya hubungan antara *good governance* dengan *Human Development* yang sangat kuat, khususnya pada aspek efektifitas

sector public (pemerintahan). Sehingga penelitian ini menyusun model penelitian sebagai berikut:

$$IPM_{i,t} = \alpha_0 + \beta_1 GCG_{i,t} + \beta_2 KMF_{i,t} + \beta_3 BLP_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad \dots \rightarrow$$

Berdasarkan penelitian dari Sebudubudu (2010), Resnick (2005) dan Ottervik (2011), maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Tingkat *Good Governance* berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.3.2. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah Dalam Memperkuat dampak pengaruh *Good Governance* Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Salah satu prinsip *good governance* adalah akuntabilitas pemeritah daerah, sebagaimana kompen CG yang dikeluarkan oleh UNDP, dari hasil penelitian Ezzamel and Willmot (1993) menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh pada *good governance* yang efeknya pada pelayanan pada publik. Demikian pula dari pernyataan Rizal Djalil (anggota BPK-RI) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan posisi Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian dari Ebrahim (2006) juga membuktikan bahwa akuntabilitas saat ini secara normative pada organisasi sektor publik akan meningkatkan *good governance*, meningkatkan kinerja keuangan dan juga meningkatkan kemajuan pembangunan baik manusi dan fisik suatu Negara. Sehingga pada penelitian ini model 3 disusun yang merangkum hipotesis diatas adalah sebagai berikut:

$$IPM_{i,t} = \alpha_0 + \beta_1 GCG_{i,t} + \beta_2 AKT_{i,t} + \beta_3 GCG * AKT_{i,t} + \beta_4 KMF_{i,t} + \beta_5 BLP_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \quad \dots \rightarrow$$

Berdasarkan penelitian dari Willmot (1993), Ebrahim (2006) dan pernyataan Rizal Djalil, maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah memperkuat pengaruh positif tingkat *Good Governance* terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.3.3. Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Dalam Memperkuat dampak pengaruh *Good Governance* Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Korupsi merupakan permasalahan hampir pada seluruh Negara di dunia ini, adanya korupsi ini akan membawa dampak pada pelayanan publik yang berkurang akibat adanya oportunitis pribadi pejabat publik. Hasil penelitian Qizilbash (2001) membuktikan bahwa korupsi secara konseptual dan nyata berhubungan negatif dengan pembangunan manusia (*human development*). Demikian pula hasil penelitian Akhter (2004) yang menemukan hubungan negatif antara korupsi dengan indeks pembangunan manusia (*human development index*).

Akcaay (2006) juga menyatakan bahwa korupsi adalah masalah besar dan sangat serius, dan hal ini berdampak serius terhadap peningkatan ekonomi sosial dan secara umum juga terhadap indeks pembangunan manusia (*human development index*) pada Negara-negara berkembang, hasil penelitian Pradhan (2012) membuktikan bahwa ada hubungan positif antara indeks persepsi korupsi dengan indeks pembangunan manusia (*human development index*). Sehingga pada penelitian ini model 4 disusun yang merangkum hipotesis diatas adalah sebagai berikut:

$$IPM_{i,t} = \alpha_0 + \beta_1 GCG_{i,t} + \beta_2 CPI_{i,t} + \beta_3 GCG * CPI_{i,t} + \beta_4 KMF_{i,t} + \beta_5 BLPI_{i,t} + \epsilon_{i,t} \quad \dots \blacktriangleright$$

Berdasarkan penelitian dari Qizilbash (2001), Akhter (2004) Akcaay (2006) dan Pradhan (2012), maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Tingkat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) daerah memperkuat pengaruh positif tingkat *Good Governance* terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

3. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah propinsi di Indonesia yang telah diteliti oleh *The Partnership for Governance Reform* (Kemitraan), dan *Transparency International Indonesia* (TII) dan lembaga Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Pemerintah daerah yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*) dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan.

Variabel dependen adalah *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* Indeks komposit yang digunakan untuk mengukur taraf kualitas hidup manusia yang dilihat dari pendidikan, kesehatan dan pendapatan perkapita sebagai tolak ukur, dinyatakan dalam persen (per seratus) yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. IPM dihitung dengan menggunakan rumus :

$$IPM = 1/3 (X_1 + X_2 + X_3)$$

Dimana :

X1 = Indeks Harapan Hidup

X2 = Indeks Pendidikan

X3 = Indeks Standar Hidup Layak

GCG (*Good Public Governance*) merupakan *Indonesia Governance Index (IGI)* yang di publikasikan oleh lembaga Kemitraan (www.kemitraan.or.id) . Indeks ini mengukur 4 arena dalam tata pemerintahan provinsi di Indonesia yaitu Pemerintah, Birokrasi, Masyarakat Sipil dan Masyarakat Ekonomi. Keempat arena ini dinilai berdasarkan enam prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu Partisipasi, Keadilan, Akuntabilitas, Transparansi, Efisiensi dan Efektivitas. Secara keseluruhan, pengukuran ini menggunakan 75 indikator yang terbagi

ke dalam 33 indikator untuk Pemerintah, 20 indikator untuk Birokrasi, 9 indikator untuk Masyarakat Ekonomi, dan 13 indikator untuk Masyarakat Sipil.

Dari hasil perhitungan masing-masing indikator kemudian di beri bobot terhadap sumbangsih pada *good governance*, yang masing masing sebesar Pemerintah (0.344), Birokrasi (0.274), Masyarakat Sipil (0.249) dan Masyarakat Ekonomi (0.142). selanjutnya dilakukan skoring dari sangat buruk dengan skor 1 dan sangt bagus dengan skor 10.

Indeks pengukuran korupsi berguna bagi lembaga pemerintah seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk dijadikan basis penentuan prioritas pemberantasan korupsi. Sementara itu, pemerintah daerah yang disurvei dapat menggunakan indeks ini sebagai bahan evaluasi mereka dalam usaha pemberantasan korupsi (Transparency International Indonesia, 2010).

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan data sekunder yang merujuk pada lembaga *Transparency International Indonesia* (TII). IPK merupakan indeks yang berupa skala numerik yang mengukur tingkat korupsi dalam pemerintah daerah. Rentang indeksnya adalah dari 0 sampai dengan 10, dengan definisi 0 berarti sangat korup dan 10 berarti sangat bersih. Indeks Persepsi Korupsi didesain untuk menghasilkan informasi yang berharga tentang fenomena korupsi di pemerintah daerah, melalui responden yang tepat untuk dimintai keterangan mengenai persepsinya terhadap korupsi (Transparency International Indonesia, 2008).

Variabel independen Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang di berikan oleh BPK-RI, Variabel dibagi menjadi empat kategori yaitu (i) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*), (ii) Wajar Dengan Pengecualian (WDP/ *Qualified opinion*), (iii) Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*) dan (iv) Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer opinion*). Kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*) diberikan skor 4 yang

merupakan skor tertinggi, sementara opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/ *Qualified opinion*) diberi skor 3, dan untuk opini Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*) diberi skor 2, dan akhirnya untuk opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer opinion*) diberi skor 1 yang merupakan skor terendah.

Data *Indonesia Governance Index* (IGI) mengambil dari publikasi dari lembaga Kemitraan yang merupakan salah satu lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didanai oleh USAID, data IGI sementara ini tersedia untuk tahun 2008 dan 2012. Sementara untuk data Indeks Persepsi Korupsi dalam penelitian ini mengambil data dari *Transparency International Indonesia* (TII) yang telah mengambil data untuk tahun 2008. Dalam memperkuat hasil penelitian ini juga mengambil data jumlah kasus korupsi dan juga jumlah kerugian akibat korupsi pada suatu daerah, data ini merujuk pada penelitian lembaga Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).

4. Pembahasan

4.1. Statistik Deskriptif.

Hasil analisis deskriptif pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah sampel (N) dari penelitian ini ada 66 sampel dari 33 Propinsi. Berdasarkan 66 sampel ini nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), nilai yang terkecil adalah 64.0 yang ada pada Propinsi Papua dan yang terbesar adalah 78.33 persen pada Propinsi DKI. Jakarta dengan nilai rata-rata sebesar 71.87 persen serta nilai penyimpangan (*deviasi standar*) dari variabel tersebut sebesar 3.11.

Pada nilai *Good Governance* (GCG) nilai terkecil adalah 3.55 pada Propinsi Sulawesi Selatan dan yang terbesar adalah 6.80 pada Propinsi DI.Yogyakarta dengan nilai rata-rata sebesar 5.4 serta nilai penyimpangan (*deviasi standar*) dari variabel tersebut 0.68. Sedangkan pada nilai AKT (Akuntabilitas) nilai yang terkecil dari variabel tersebut 1 pada Propinsi Bali dan Propinsi Kalimantan Barat dan yang terbesar adalah 4 pada beberapa Propinsi seperti

Propinsi DKI. Jakarta dan Propinsi Sumatera Barat dengan nilai rata-rata 3 serta nilai penyimpangan (*deviasi standar*) dari variabel tersebut 0.94.

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Rata-rata	Median	Std. Deviasi
IPM	66	64.00	78.33	71.87	72.09	3.11
GCG	66	3.55	6.80	5.40	5.49	0.68
AKT	66	1.00	4.00	3.00	3.00	0.94
CPI	33	2.97	6.43	4.48	4.50	0.70
KMF	66	0.05	0.74	0.38	0.38	0.19
BLP	66	99,184	11,086,000	828,850	456,058	1,605,645
KSS	33	66.00	967.00	288.00	251.00	189.04
KRG	33	998.00	400,101.00	70,923.00	381,148.00	94,854.00

Sumber: data olahan Eviews

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan Indeks yang merepresentasikan capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, **GCG** (*Good Public Governance*) merupakan *Indonesia Governance Index* (IGI) yang mengukur 4 arena dalam tata pemerintahan provinsi di Indonesia yaitu Pemerintah, Birokrasi, Masyarakat Sipil dan Masyarakat Ekonomi. Keempat arena ini dinilai berdasarkan enam prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu Partisipasi, Keadilan, Akuntabilitas, Transparansi, Efisiensi dan Efektivitas, kemudian dilakukan scoring dari sangat buruk dengan skor 1 dan sangat bagus dengan skor 10, **AKT** (Akuntabilitas) merupakan opini yang di berikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikelompokkan menjadi 4 jenis kategori opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion) di beri skor 4, Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion) diberi skor 3, Tidak Wajar (TW/Adverse opinion) diberi skor 2 dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer opinion) diberi skor 1, **CPI** (*Corruption Perception Index*) merupakan indeks persepsi masyarakat terhadap korupsi dengan skor 0 sampai dengan 10. Skor 10 berarti suatu wilayah bebas dari korupsi dan sebaliknya jika nol maka semakin korup, **KMF** (Kemandirian Fiskal) merupakan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah, **BLP** (Belanja Pegawai) merupakan jumlah belanja pegawai daerah yang dibagi 1.000.000, **KSS** (Jumlah Kasus) merupakan variabel jumlah kasus korupsi pada tahun tertentu, dan **KRG** (Jumlah Kerugian) merupakan jumlah kerugian akibat tindakan korupsi pada tahun tertentu yang di bagi dengan 1.000.000.

4.2. Hasil Regresi

Pada model penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) model yang masing-masing mempresentasikan variabel independen yang ada, pada model 1 hanya menghubungkan antara GCG dengan IPM, model 2 dengan menambahkan variabel KMF dan BLP. Pada model 3 menambahkan variabel independen AKT dan juga interaksi antara GCG*AKT, dan pada Model 4 menggunakan variabel independen CPI dan juga interaksi antara GCG*CPI.

Berdasarkan Tabel 4.2 pada model 1 dan 2, penelitian ini menemukan hubungan positif dan signifikan antara *good governane* dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hampir dalam semua model penelitian ini ($p < 0.01$). Pada model 1 hanya menguji hubungan GCG terhadap IPM, hasil pengujian ini signifikan pada level 1% dan koefisien sebesar 2.181 serta *Adjusted-R²* sebesar 21%, sedangkan pada model 2 menghasilkan signifikan positif pada level 1% pengaruh *good governane* terhadap IPM dengan koefisien positif sebesar 1.673, dan hanya variabel kontrol jumlah belanja pegawai (BLP) yang berpengaruh positif signifikan pada level 5% terhadap IPM dengan koefisien sebesar 4.63. dan hanya variabel kemandirian fiskal (KMF) tidak berpengaruh signifikan pada IPM.

Tabel 4.2
Hasil Regresi

Uji Pengaruh *Good Public Governance* Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Variabel	Predicted sign	IPM			
		1	2	3	4
GCG	+	0.0001*	0.0019*	0.0636***	0.4471
		2.18152	1.67355	1.16886	0.62316
AKT	+			0.0397**	
				0.7760	
CPI	+				0.5674
					0.42795
GCG*AKT	+			0.0041*	
				0.17442	
GCG*CPI	+				0.5834
					0.07926
KMF	+		0.1914	0.0608***	0.2577
			2.496379	3.55446	3.00101
BLP	+		0.0386**	0.0534**	0.0857***
			4.63	4.41	7.54
Adjusted-R ²		0.2143	0.2828	0.266	0.114

Notes:

***= signifikan dalam 10%

**= signifikan dalam 5%

* = signifikan dalam 1%

Sumber: data olahan Eviews

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan Indeks yang merepresentasikan capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, **GCG** (*Good Public Governance*) merupakan *Indonesia Governance Index* (IGI) yang mengukur 4 arena dalam tata pemerintahan provinsi di Indonesia yaitu Pemerintah, Birokrasi, Masyarakat Sipil dan Masyarakat Ekonomi. Keempat arena ini dinilai berdasarkan enam prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu Partisipasi, Keadilan, Akuntabilitas, Transparansi, Efisiensi dan Efektivitas, kemudian dilakukan scoring dari sangat buruk dengan skor 1 dan sangat bagus dengan skor

10, **AKT** (Akuntabilitas) merupakan opini yang di berikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikelompokkan menjadi 4 jenis kategori opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion) di beri skor 4, Wajar Dengan Pengecualian (WDP/Qualified opinion) diberi skor 3, Tidak Wajar (TW/Adverse opinion) diberi skor 2 dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP/Disclaimer opinion) diberi skor 1, **CPI** (*Corruption Perception Index*) merupakan indeks persepsi masyarakat terhadap korupsi dengan skor 0 sampai dengan 10. Skor 10 berarti suatu wilayah bebas dari korupsi dan sebaliknya jika nol maka semakin korup, **KMF** (Kemandirian Fiskal) merupakan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah, **BLP** (Belanja Pegawai) merupakan jumlah belanja pegawai daerah yang dibagi 1.000.000.

Hasil pada model 1 dan 2 ini mendukung hipotesis penelitian ini H_1 yang menyatakan bahwa ada pengaruh *good governane* terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia yang artinya bahwa pengujian ini menyimpulkan tidak dapat menolak H_0 . Hasil penelitian ini mendukung argumen Sebudubudu (2010) menyatakan adanya hubungan positif antara *good governance* dengan *Human Development Index di Bostwana*, demikian pula dengan hasil penelitian Resnick (2005) yang membuktikan bahwa *good governance* salah satu hal terpenting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan IPM, serta penelitian dari Ottervik (2011) juga memberikan bukti adanya hubungan antara *good governance* dengan *Human Development* yang sangat kuat, khususnya pada aspek efektifitas sector public (pemerintahan). Sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung *good governance* akan membawa dampak pada efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintahan, sehingga dampak *good governance* juga akan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Tabel 4.2 pada model 3, penelitian ini membuktikan hubungan positif dan signifikan antara *good governane* dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan signifikansi sebesar 6% ($p < 0.1$). Demikian pula variabel Akuntabilitas (AKT) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan signifikansi sebesar 3% ($p < 0.05$). Untuk membuktikan hipotesis kedua, maka dilakukan interaksi antara variabel *good governane (GCG)* dengan variabel Akuntabilitas (AKT) menjadi ($GCG*AKT$), hasil dari interaksi tersebut menyakinkan peneliti bahwa akuntabilitas laporan keuangan daerah memperkuat dampak pada pengaruh *good governane* terhadap Indeks Pembangunan

Manusia (IPM), hasil statistik menunjukkan hasil signifikan positif sebesar 0,4% ($p < 0.1$). sehingga penelitian ini tidak menolak hipotesis bahwa Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah memperkuat pengaruh positif tingkat *Good Governance* terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil pengujian ini memiliki tingkat kekuatan model atau *Adjusted-R²* sebesar 28%, dan hanya variabel kontrol jumlah belanja pegawai (BLP) maupun variabel kemandirian fiskal (KMF) berpengaruh positif signifikan pada level 5% dan 10% terhadap IPM dengan koefisien masing-masing sebesar sebesar 3.554 dan 4.41. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ezzamel and Willmot (1993) menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan berpengaruh pada *good governance* yang efeknya pada pelayanan pada publik dan juga Penelitian dari Ebrahim (2006) juga membuktikan bahwa akuntabilitas saat ini secara normative pada organisasi sektor publik akan meningkatkan *good governance*, meningkatkan kinerja keuangan dan juga meningkatkan kemajuan pembangunan baik manusia dan fisik suatu Negara.

Berdasarkan Tabel 4.2 pada model 4, penelitian ini membuktikan hubungan positif namun tidak signifikan antara *good governane* dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Demikian pula Indeks Persepsi Korupsi (CPI) juga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk membuktikan hipotesis ketiga dalam penelitian ini, maka dilakukan interaksi antara variabel *good governane (GCG)* dengan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) menjadi ($GCG * CPI$), hasil dari interaksi tersebut juga membuktikan hubungan positif namun tidak signifikan, sehingga peneliti berpendapat bahwa Indeks Persepsi Korupsi (CPI) memperkuat dampak pada pengaruh *good governane* terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) namun tidak kuat (lemah). Sehingga penelitian ini menolak hipotesis bahwa Indeks Persepsi Korupsi (CPI) memperkuat pengaruh positif tingkat *Good Governance* terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian dari Qizilbash (2001) yang berhasil membuktikan bahwa korupsi secara konseptual dan nyata berhubungan negatif dengan pembangunan manusia (*human development*). Demikian pula hasil penelitian Akhter (2004) yang menemukan hubungan negatif antara korupsi dengan indeks pembangunan manusia (*human development index*). Dan juga hasil penelitian dari Akcay (2006) juga menyatakan bahwa korupsi adalah masalah besar dan sangat serius, dan hal ini berdampak serius terhadap peningkatan ekonomi sosial dan secara umum juga terhadap indeks pembangunan manusia (*human development index*) pada Negara-negara berkembang. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian Pradhan (2012) membuktikan bahwa ada hubungan positif antara indeks persepsi korupsi dengan indeks pembangunan manusia (*human development index*).

4.3. Uji Sensitivity

Adaya temuan pada hipotesis ke tiga bahwa Indeks Persepsi Korupsi (CPI) tidak memperkuat pengaruh positif tingkat *Good Governance* terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka dilakukan pengujian dengan menggunakan variabel jumlah kasus korupsi (KSS) dan juga jumlah kerugian (KRG) akibat dampak korupsi pada suatu daerah di Indonesia, data ini merujuk pada hasil penelitian lembaga Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Tabel 4.3 menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan hubungan positif dan signifikan antara *good governane* dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada ketiga model penelitian dengan signifikansi sebesar 2% ($p < 0.05$).

Namun demikian jumlah kerugian (KRG) akibat korupsi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Serta untuk variabel jumlah kasus korupsi (KSS) juga korupsi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana tergambar pada model 1 dan 2. Untuk

membuktikan adanya variabel lain selain CPI yang dapat memperkuat CG terhadap IPM, maka dilakukan interaksi antara variabel *good governane (GCG)* dengan jumlah kasus korupsi (KSS) serta jumlah kerugian (KRG) sehingga menjadi (GCG*KRG*KSS), hasil dari interaksi tersebut juga membuktikan hubungan positif namun tidak signifikan, sehingga peneliti berpendapat bahwa korupsi di Indonesia memperkuat dampak pada pengaruh *good governane* terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) namun tidak kuat (lemah).

Tabel 4.3

Hasil Regresi

Uji Pengaruh *Good Public Governance* Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Variabel	Predicted sign	IPM		
		1	2	3
GCG	+	0.0204**	0.0213**	0.0237**
		2.4133	2.6303	2.6372
KRG	-	0.2783		0.9220
		-6.53E-05		-5.06E-07
KSS	-		0.5750	0.6390
			-0.002252	0.002003
GCG*KRG	+	0.2766		
		1.13E-05		
GCG*KSS	+		0.7040	
			0.001511	
GCG*KRG*KSS	+			0.5668
				7.77E-09
KMF	+	0.0617***	0.2383	0.5133
		5.97935	4.62923	3.224367
BLP	+	0.21866	0.2083	0.7111
		3.65	5.415	4.06
Adjusted-R ²		0.293	0.277	0.254

Notes:

***= signifikan dalam 10%

**= signifikan dalam 5%

* = signifikan dalam 1%

Sumber: data olahan Eviews

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan Indeks yang merepresentasikan capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, **GCG** (*Good Public Governance*) merupakan *Indonesia Governance Index* (IGI) yang mengukur 4 arena dalam tata pemerintahan provinsi di Indonesia yaitu Pemerintah, Birokrasi, Masyarakat Sipil dan Masyarakat Ekonomi. Keempat arena ini dinilai berdasarkan enam prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu Partisipasi, Keadilan, Akuntabilitas, Transparansi, Efisiensi dan Efektivitas, kemudian dilakukan scoring dari sangat buruk dengan skor 1 dan sangat bagus dengan skor

10, **KSS** (Jumlah Kasus) merupakan variabel jumlah kasus korupsi pada tahun tertentu, **KRG** (Jumlah Kerugian) merupakan jumlah kerugian akibat tindakan korupsi pada tahun tertentu yang di bagi dengan 1.000.000, **KMF** (Kemandirian Fiskal) merupakan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah, dan **BLP** (Belanja Pegawai) merupakan jumlah belanja pegawai daerah yang dibagi 1.000.000.

5. Kesimpulan Dan Saran

Secara empiris hasil penelitian ini menggambarkan bahwa *good governance* berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) /*Human Development Index* (HDI) di Indonesia, yang artinya bahwa prinsip-prinsip yang terkandung *good governance* akan membawa dampak pada efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintahan, sehingga dampak *good governance* juga akan mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil ini juga membuktikan bahwa akuntabilitas dan juga indeks persepsi korupsi dapat memperkuat pengaruh *good governance* berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) /*Human Development Index* (HDI) di Indonesia.

Penelitian ini menambahkan hasil penelitian Sebudubudu (2010) menyatakan adanya hubungan positif antara *good governance* dengan *Human Development Index di Bostwana*, demikian pula dengan hasil penelitian Resnick (2005) yang membuktikan bahwa *good governance* salah satu hal terpenting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan IPM, serta penelitian dari Ottervik (2011) juga memberikan bukti adanya hubungan antara *good governance* dengan *Human Development* yang sangat kuat, khususnya pada asepek efektifitas sector public (pemerintahan).

Penelitian ini memiliki keterbatasan adanya data sekunder yang hanya ada pada beberapa tahun saja (2008 dan 2012) dan juga hanya melibatkan 33 Propinsi di Indonesia, tidak secara keseluruhan pemerintah daerah di Indonesia, hal ini karena data IGI yang di publikasikan oleh lembaga Kemitraan, hanya melakukan pada tahun tersebut, demikian pula dengan jumlah kasus dan jumlah kerugian dari Korupsi juga hanya tersedia data pada tahun 2012 dan

hanya untuk 33 propinsi di Indonesia, sehingga sampel dalam penelitian ini masih sedikit yang di khawatirkan dapat menimbulkan bias dalam hasil penelitian ini.

Daftar Pustaka;

- Akcay Selcuk. 2006. Corruption And Human Development. *Cato Journal*. Vol. 26, No. 1 (Winter 2006).
- Akhter, H. S. 2004. "Is Globalization What It's Cracked Up to Be? Economic Freedom, Corruption, and Human Development.". *Journal of World Business* 39: 283–95.
- Badrudin, Rudy dan Mufidhatul Khasanah. 2011. Pengaruh Pendapatan Dan Belanja Daerah Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan* Volume 9, Nomor 1, April 2011: 23-30.
- Ebrahim Alnoor. 2006. *Placing the Normative Logics of Accountability in "Thick" Perspective*. Harvard University Working Paper No. 33.2 October 2006
- Ezzamel and Willmot. 1993. Corporate Governance and Financial Accountability: Recent Reforms the UK Public Sector. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. 1993, 6 pg109.
- Godwin E. Akpan, Ekpeno L. Effiong. 2012. Governance and Development Performance: A Cross-Country Analysis of Sub-Saharan Africa. *Journal of Economics and Sustainable Development* ISSN 2222-2855 Vol.3, No.14, 2012'
- Jean-Paul Faguet. 2004. Does decentralization increase government responsiveness to local needs? Evidence from Bolivia. *Journal of Public Economics* 88 (2004) 867– 893.
- Moe TM, 1984, The new economics of organization. *Am. J. Polit. Sci.* 28:739–77
- Nielsen Michael. Jakob Haugaard. 2000. *Democracy, Corruption, and Human Development Approaches to Development*. University of Aarhus Denmark. Spring 2000
- Ottervik Mattias. 2011. *Good' Governance and Human Development: The Case of China and India*. Lund University Department of Political Science, Spring 2011
- Outreville J. François. 1999. *Financial Development, Human Capital And Political Stability*. United Nations Office at Geneva report.
- Peter Sturm. 2013. *Public Sector Governance and Development Performance - An international comparison with special focus on Vietnam*. Working Paper Series No. 2013/2; <http://www.depcenwp.org>.
- Pradhan Prajwal Mani. 2012. *Understanding The Relationship Between Human Development Index (HDI) And Corruption Perception Index (CPI) For Nepal*. North South University, Bangladesh.
- Prasetijo. 2009. *Good Governance Dan Pembangunan Berkelanjutan*. <http://prasetijo.wordpress.com>. diakses 21-5-2014
- Qizilbash, M. 2001. "Corruption and Human Development: A Conceptual Discussion". *Oxford Development Studies* 29 (3): 265–78.
- Sebudubudu David. 2010. The impact of good governance on development and poverty in Africa: Botswana - A relatively successful African initiative. *African Journal of Political Science and International Relations* Vol. 4(7), pp. 249-262, October 2010

- Setiawan Hadi, Sofia Arie Damayanty. 2009. *Causality Analysis Between Financial Performance and Human Development Index: Case Study on Province in Eastern Indonesia*. <https://www.conftool.com/index./Setiawan-Causality> diakses 21-5-2014.
- Setiawan M.B. dan Abdul Hakim. 2013. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Economia*, Volume 9, Nomor 1, April 2013.
- Umbreen Javaid,. 2010. Corruption And Its Deep Impact On Good Governance In Pakistan. *Pakistan Economic and Social Review* Volume 48, No. 1 (Summer 2010), pp. 123-134).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Widodo Adi, et.al. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Juli 2011, Volume 1, Nomor 1.
- Zaman Khalid, Zeeshan Izhar, Muhammad Mushtaq Khan, Mehboob Ahmad. 2012. The relationship between financial indicators and human development in Pakistan. *Economic Modelling Journal* 29 (2012) 1515–1523.

<http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-1990-1995>.

<http://knkg-indonesia.com/home/news/93-10-prinsip-good-governance.html>

http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=240:korupsi-di-indonesia&catid=161:catatan-ketua-khn&Itemid=621.

www.hukumonline.com

www.republika.co.id

web.worldbank.org.

www.bpk.go.id

www.jurnas.com/new

www.transparency.org